

OPERASI KONTRA TEROR KOALISI GLOBAL DALAM MENGHADAPI PERGERAKAN *ISLAMIC STATES OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)*

Azhari Setiawan & Alfajri

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab
Jl. Riau No. 73, Tampan, Kota Pekanbaru, Indonesia 28291
azhari.setiawan@univrab.ac.id

ABSTRACT

This study reveals the movement of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) from two perspectives that are essentially contradictory. These two points of view are related to the relationship between the distribution of capabilities between actors in the Middle East and ISIS movements. The first point of view sees that ISIS is a consequence of the distribution of capability of actors in the Middle East, while the second point of view sees that ISIS is a determinant of the distribution of capabilities in the Middle East. There are two main arguments to see the relationship between the distribution of actor capabilities in the current international system and the emergence and development of ISIS. First, the distribution of capability of actors in the international system (Middle East) caused ISIS to be borned and developed. Second, on the contrary, the movement and development of ISIS in the Middle East influenced the distribution of capability of related actors in the international system (Middle East and surrounding areas). The first thesis emphasizes that the distribution of capabilities and conditions of the international system in the Middle East triggered/motivated the birth of ISIS. In this case ISIS becomes dependent variable. Then, the second thesis emphasizes the influence of ISIS on the conditions of the international system. It means that, it is ISIS movement that influenced the distribution of capabilities among actors in the international system. The distribution of US power that decided to enter the Middle East [starting from the participation of the United States in the Gulf War, the invasion of Iraq, the Arab Spring, etc.] triggered the birth of protest movements which led to the Asymmetric War against terrorism. The participation of other major countries in the Middle East conflict contributed to the situation in the Middle East. The distribution of power in Iraq and Syria greatly affected the birth of ISIS.

Keywords: *ISIS, Arab Spring, United States of America, Power Distribution*

ABSTRAK

Penelitian menjelaskan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari dua perspektif yang berbeda. Kedua perspektif tersebut berkaitan dengan distribusi kapabilitas antara berbagai aktor di Timur Tengah dan ISIS. Perspektif pertama melihat bahwa ISIS merupakan konsekuensi dari distribusi kapabilitas aktor di Timur Tengah, sementara perspektif kedua melihat bahwa ISIS merupakan determinan distribusi kapabilitas tersebut. Terdapat dua argumen untuk melihat hubungan antara distribusi kapabilitas aktor dalam sistem internasional kontemporer dan kemunculan sekaligus perkembangan ISIS. Pertama, distribusi kapabilitas aktor sistem internasional pada tingkat kawasan Timur Tengah menjadi penyebab kemunculan dan perkembangan ISIS. Kedua, pergerakan dan perkembangan ISIS di Timur Tengah dipengaruhi oleh distribusi kapabilitas aktor-aktor terkait dalam sistem internasional di Timur Tengah dan kawasan sekitarnya. Argumen pertama menekankan bahwa distribusi kapabilitas dan kondisi sistem internasional di Timur Tengah menjadi penyebab kemunculan ISIS. Dalam hal ini ISIS menjadi variabel dependen. Argumen kedua menekankan pengaruh ISIS terhadap kondisi kapabilitas antar aktor dalam sistem internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ISIS lah yang mempengaruhi kapabilitas antar aktor dalam sistem internasional tersebut. Distribusi kekuatan Amerika Serikat yang memutuskan untuk mencampuri permasalahan di Timur Tengah [mulai dari keterlibatan Amerika dalam Perang Teluk, invansi ke Irak, Arab Spring, dan lain-lain] memicu lahirnya gerakan protes yang mengarah pada perang asimetris melawan terorisme. Keterlibatan negara lain dalam konflik Timur Tengah juga turut memberikan kontribusi terhadap situasi Timur

Tengah saat ini. Distribusi kekuatan aktor di Irak dan Suriah yang pada akhirnya mendorong kelahiran ISIS.

Kata kunci: ISIS, Arab Spring, Amerika Serikat, distribusi kekuatan

PENDAHULUAN

Penggalan-penggalan sejarah politik internasional dibatasi oleh momentum-momentum penting yang mengubah realitas sejarah. Rizal Sukma, mengemukakan bahwa tatanan dunia (*world order*) kerap kali berubah ketika terjadi *defining moment* yang dramatis (Rizal Sukma, 2001:1). Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, segera diikuti dengan dimulainya era Perang Dingin. Ketika Tembok Berlin runtuh tahun 1989, masyarakat internasional melihat ini sebagai awal dari lahirnya era *Post Cold War*. Kemudian, runtuhnya gedung WTC 11 September 2001 dinilai sebagai *defining moment* yang mengakhiri perang dingin dan memulai sebuah perang baru, *War on Terrorism*. Kematian Osama bin Laden 2 Mei 2011 oleh pasukan militer khusus Amerika Serikat di Afghanistan yang masih menjadi kontroversial juga dinilai sebagai *defining moment* berakhirnya era perang dunia melawan Al-Qaeda.

*War on Terrorism*¹ adalah perang yang tiada berujung. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi “*war is over..*” oleh pihak manapun. Artinya, terorisme masih menjadi momok bagi percaturan politik internasional. Setelah Al-Qaeda dan kematian Osama bin Laden, dilanjutkan dengan munculnya ISIS (*Islamic State Iraq and Syams*)² yang menandakan bahwa perang terhadap terorisme belum berakhir, bahkan memasuki

¹ *The war on Terror (WoT)*, juga dikenal sebagai *Global War on Terrorism (GWOT)*, istilah ini ditujukan kepada kampanye militer internasional yang dimulai setelah peristiwa serangan 11 September 2001, WTC, New York, Amerika Serikat. Amerika Serikat mengkampanyekan sekaligus memimpin perang terhadap terorisme global untuk menyerang Al-Qaeda dan Kelompok Teroris lainnya yang dinilai bertanggung jawab atas peristiwa 11 September. Istilah *War on Terror* pertama kali secara resmi digunakan oleh Presiden George W. Bush pada 20 September 2001 pada pidatonya terkait respon terhadap runtuhnya gedung *World Trade Center* karena tabrakan dua pesawat komersil yang dibajak oleh kelompok teroris.

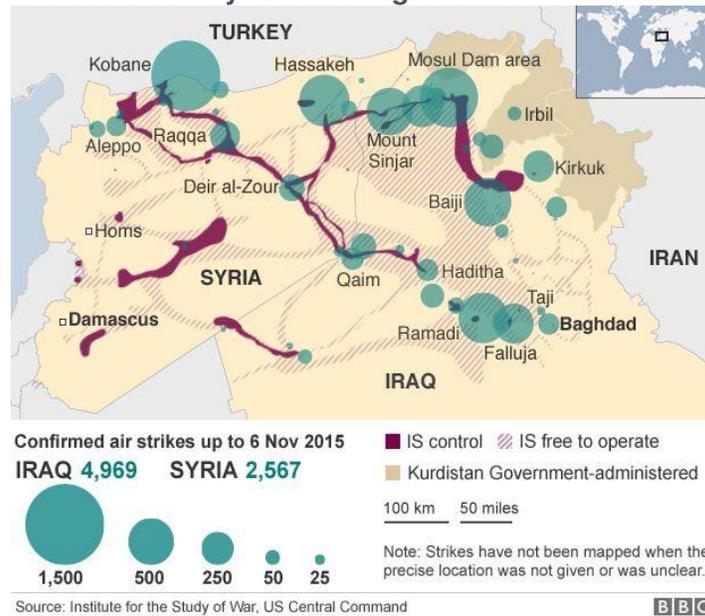
² Negara Islam Irak dan Syam (disebut juga ISIS, singkatan dari *the Islamic State of Iraq and Syria*, dalam Bahasa Arab: *الدولة الإسلامية في العراق والشام al-Dawlah al-Islāmiyah fī al-‘Irāq wa-al-Shām*) juga dikenal sebagai Negara Islam (Islamic State (IS) bahasa Arab: *الدولة الإسلامية ad-Dawlah al-‘Islāmiyyah*), dan Negara Islam Irak dan Levant (bahasa Inggris: *Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)*) adalah sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah. Kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan didukung oleh berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak (AQI), termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatihien, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni. Tokoh Sentral di Balik Militer ISIS adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front Al Nusra, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi Al-Qaidah di Suriah. ISIS memiliki hubungan dekat dengan Al-Qaeda hingga tahun 2014. Namun karena misi berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah dan penggunaan aksi-aksi kekerasan, Al-Qaidah lalu tidak mengakui kelompok ini sebagai bagian darinya lagi.

babak kedua. Unik tentang *defining moment* yang digunakan oleh Rizal Sukma sebagai momentum berakhirnya sebuah penggalan sejarah percaturan politik internasional, kemunculan ISIS justru menegaskan bahwa "*the show must go on*". Belum ada *defining moment* yang mengakhiri perang terhadap ISIS di Timur Tengah.

Apakah *War on Terror* dapat dimenangkan? Kemenangan melawan terorisme berarti bahwa baik "terror" dan "isme" harus dikalahkan atau dimusnahkan. Philip H Gordon dalam tulisannya "*Can the War on Terror Be Won?*" menyatakan bahwa deklarasi perang terhadap terorisme yang dibawa oleh Bush, melupakan "*how to win it*", bahkan kemenangan yang dimaksud oleh Bush dan Amerika Serikat masih menjadi perdebatan. Gordon menambahkan "*Almost entirely missing from this debate is a concept of what victory in the war on terror would actually look like*" (Philip H. Gordon, 2009:49). Gordon dalam tulisannya mengkritik bahwa perbedaan perang konvensional dan perang melawan terorisme terletak pada bagaimana mengakhiri perang tersebut dan konsep "kemenangan" yang tidak bisa disamakan. Tidak seperti perang konvensional, *War on Terror* tidak memiliki *Last War* yang dapat dijadikan momentum berakhirnya perang.

ISIS merupakan organisasi yang dari ke waktu ke waktu terus berkembang dan memperluas daerah kekuasaannya. Organisasi yang awalnya bermula di Iraq pasca serangan Amerika Serikat ke Iraq tahun 2003, memicu Baghdadi pra ISIS membentuk *Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah (JJASJ)*, Angkatan Bersenjata Kelompok Warga Sunni, yang beroperasi dari Samarra, Diyala, dan Baghdad. Di dalam kelompok ini, Baghdadi menjadi pemimpin dewan hukum sampai pada akhirnya JJASJ bergabung dan lepas dari Al-Qaeda dan berdiri sendiri sebagai ISIS (Aaron Y. Zelin, 2014). Fenomena ISIS semakin terlihat setelah Abu Bakar Al Baghdadi diangkat menjadi pemimpin ISIS pada tahun 2010 menggantikan Abu Umar al-Baghdadi yang meninggal. ISIS kemudian menyebar baik secara teritori dan pengaruh ke Turki, Mesir, Yordania, Lebanon, Liberia, Nigeria, bahkan Asia Tenggara dan Eropa (Institute for the Study of War, 2018). Pengaruh ISIS semakin terasa dan menyita perhatian dunia ketika ISIS berhasil menguasai daerah Mosul, Iraq Juni 2014 dan menyita peralatan-peralatan militer termasuk bahan nuklir dari *Mosul University* (Cowell Alan, 2018).

Gambar 1.1. Peta Penyebaran Pergerakan ISIS di Timur Tengah



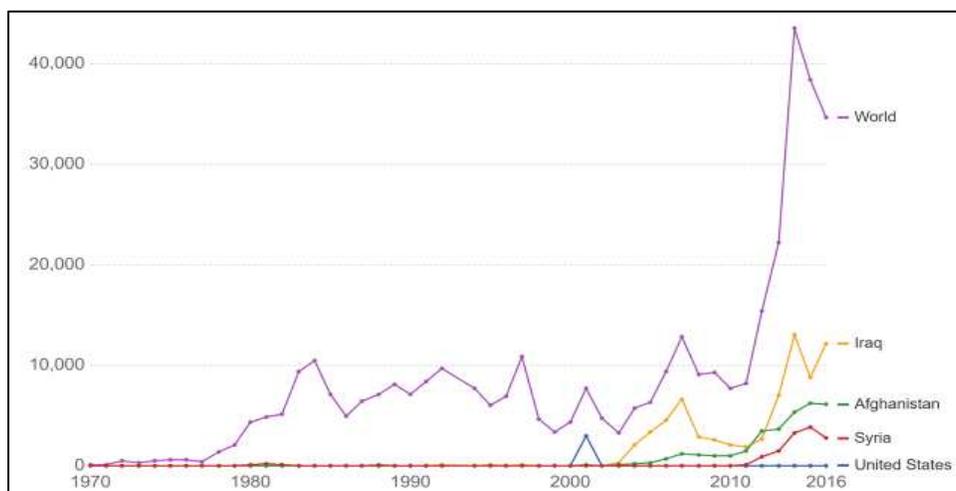
Sumber: *Institute for the Study of War, US Central Command*

Besarnya ancaman yang ditunjukkan oleh pergerakan ISIS di Timur Tengah membuat Negara-negara besar membangun koalisi yang terdiri dari banyak Negara baik dari dalam maupun luar Timur Tengah untuk melumpuhkan ISIS pada tahun 2012. Total negara yang ikut serta dalam memborbardir ISIS secara militer (*Airstrikes*) mencapai jumlah enam belas Negara antara lain: Amerika Serikat, Iran, Iraq (*Kurdistan Government*), Inggris, Prancis, Russia, Turki, Australia, Mesir, Arab Saudi, Qatar, UEA, Kanada, Belanda, Yordania, dan Italia (*Surveillance*). Data yang ditunjukkan oleh Justine Drennan yang dilansir *foreignpolicy.com* bahwa terdapat 62 jumlah total Negara yang ikut serta dalam “*Global Coalition to Degrade and Defeat Isil*” (Justine Drennan, 2014). Serangan pertama diluncurkan lewat serang udara oleh Amerika Serikat dengan delapan ratus serangan udara dan lebih dari tiga ribu pasukan darat di Iraq. Jumlah yang sangat banyak ini (sekitar lebih dari 30% dari total seluruh Negara di dunia) terdiri dari intervensi militer dan bantuan kemanusiaan.

Lebih dari sepertiga dari jumlah Negara di seluruh dunia (anggota PBB) ternyata tidak mampu membumihanguskan ISIS di Timur Tengah. Lebih dari 7000 serangan udara (Thomas M. Sanderson, 2015: 2) tidak mampu menumpas ISIS hingga sampai ke akar-akarnya. Intervensi koalisi Negara-negara melawan

ISIS semakin membuat konflik di Timur Tengah semakin kompleks. Arus pengungsi semakin deras menuju Eropa akibat daerah-daerah yang diserang lewat udara oleh koalisi Negara justru menambah kerusakan fisik dan non fisik di Timur Tengah. Thomas M. Sanderson dalam artikelnya, *the Challenge of Deterring ISIS*, mengatakan bahwa semakin dibombardirnya ISIS oleh koalisi global internasional justru membuat ISIS semakin berkembang karena “mati” adalah tujuan sekaligus penyemangat dan selebrasi bagi organisasi ini untuk terus berjuang (Thomas M. Sanderson, 2015: 2). Menurut Sanderson, koalisi justru membesarkan ISIS. Dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut bahwa secara keseluruhan sejak operasi dan kebijakan “*War on Terror*” dipublikasikan, terorisme di skala global meningkat drastic hingga tahun 2016. Bentangan dari tahun 2003 sampai dengan 2016 banyak diiringi oleh sejumlah perang-perang asimetris dan konflik internal Kawasan khususnya di Timur Tengah (Iraq, Afghanistan, dan Suriah). Rentang kurang lebih tiga belas tahun ini merupakan masa-masa krisis konflik di Timur Tengah yang berkaitan dengan terorisme.

Grafik 1.1 Jumlah Insiden yang Berkaitan dengan Terorisme 1970 s.d. 2016



Sumber: Terrorism Incidents – Global Terrorism Database, OurWorldInData.org/terrorism/ CC BY-SA

Sampai saat ini, belum ada titik terang akhir dari *War on Terrorism*. Berita terbaru di Perancis, enam tempat di daerah berbeda di Paris dihujani serangan tembakan dan ledakan bom yang menewaskan ratusan korban jiwa (Rukmini Callimachi, 2015). Media-media massa internasional memberitakan bahwa aksi

terror ini telah diklaim ISIS sebagai tanggung jawabnya. Pengakuan ISIS ini dipublikasi dalam bentuk komunike berbahasa Arab, Inggris, dan Prancis di akun *Islamic State's Telegram* dan kemudian didistribusikan lewat para pendukungnya di Twitter, lewat sebuah transkrip yang dilacak oleh *SITE Intelligence Group*. Penembak dan *bomber* ISIS menyerang beberapa tempat-tempat umum di Paris seperti *concert hall*, stadium olah raga dan juga restaurant (The Jerusalem Post, 14 November 2015).

Timur Tengah, bagi dunia internasional, menjadi semakin kompleks dari segi konflik dan implikasinya. Keterlibatan banyak aktor melawan satu entitas politik tidak mampu mencapai kata menang. *Headline-headline* berita-berita internasional masih saja menjadikan ISIS sebagai isu utama dengan terus mengeluarkan berita terbaru. Padahal, jumlah total Negara yang ikut serta dalam koalisi memerangi ISIS berjumlah lebih dari 60 negara yang juga terdiri dari Negara-negara besar, lebih dari sepertiga jumlah total Negara dunia, namun terorisme masih saja menjadi momok bagi Timur Tengah, dan dunia internasional.

Berdasarkan pemaparan penulis di awal, maka pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mengapa koalisi global yang dipimpin oleh Negara-negara besar belum bisa menyelesaikan konflik melawan ISIS di Timur Tengah?

Penelitian ini disusun bertujuan untuk: Pertama, memahami kegagalan koalisi global yang dipimpin Negara-negara besar dalam memerangi ISIS di Timur Tengah. Kedua, memahami kekuatan dan ketahanan *Non-state Actor* dalam menghadapi gempuran Koalisi Global yang dipimpin oleh Negara-negara *Superpower* dan Ketiga, untuk memahami eksistensi dan posisi *Transnational Islamic Movement* dalam Studi Hubungan Internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *Cause, Responses and Nature Change of Terrorism* dari Viotti dan Kauppi untuk menjelaskan mengapa terorisme yang hanyalah sebuah entitas politik berkekuatan militer yang masih di bawah negara bisa muncul dan bertahan cukup lama. Selain itu juga tulisan ini melihat pandangan Bruce Hoffman tentang anomali perkembangan kekuatan teroris di tengah gempuran koalisi Negara-negara besar. Penulis menjadikan pandangan-pandangan ini sebagai *pretext* yang memberikan jawaban mengapa entitas kecil seperti ISIS dapat bertahan dan sulit untuk dikalahkan gabungan sepertiga dari jumlah total Negara-negara di dunia.

Terdapat tiga justifikasi teori yang penulis ajukan. Pertama, untuk memahami mengapa sebuah entitas sulit sekali untuk dibumi hanguskan, maka mengetahui substansi-substansi apa yang melahirkan ketahanan ini akan menjadi hal yang penting. Kedua, berdasarkan pemaparan di awal, koalisi global melawan ISIS adalah koalisi ofensif berbasis militer dan bantuan kemanusiaan. Teori yang penulis gunakan ini akan menjawab pertanyaan, apakah militer adalah instrumen yang tepat dalam menghadapi dan menanggulangi terorisme. Ketiga, Viotti dan Kauppi menjelaskan dalam teorinya tentang respon-respon ideal yang dapat digunakan sebuah Negara (ataupun koalisi Negara-negara) dalam menghadapi terorisme. Respon-respon berupa strategi ideal ini yang akan menunjukkan apa yang telah dan tidak dilakukan oleh koalisi global dalam memerangi terorisme

Viotti-kauppi dalam buku yang mereka susun berjudul "*International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*" menjelaskan ada tiga penyebab lahir dan berkembangnya terorisme antara lain: 1) *Pshychological/Social Factors*; 2) *Ideological Factors*; dan 3) *Environmental Factors* (Paul Viotti & Mark Kauppi, 2007: 281). Faktor pertama, psikologi dan/sosial, Viotti-kauppi menjelaskan bahwa individu-individu yang terkait dengan suatu tindak teroris dinilai memiliki kelainan dari sisi kejiwaan dan kondisi

sosial (*mentally disturbed*) (Paul Viotti & Mark Kauppi, 2007: 281). Namun menganggap teroris sebagai pihak yang secara mental mengalami gangguan juga tidak benar karena hal terpenting yang sama-sama dimiliki oleh teroris adalah *their normality*. Dalam bahasa Viotti-kauppi “*a young person with few life prospects may choose to join a terrorist organization for the expected thrill of life in the underground, or as a way to enhance his or her self-esteem by becoming a ‘Defender of the Community’*” (Paul Viotti & Mark Kauppi, 2007: 281). Artinya, teroris menganggap diri mereka bukanlah sebagai “teroris”, melainkan “*Defender of the Community*”. Mereka secara psikologis, merasa apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari “pembebasan”. Pembebasan diri, dan masyarakatnya dari korupsi sebuah sistem yang merusak tatanan sosial masyarakat menjadi sebuah krisis berkepanjangan.

Faktor yang kedua, Ideologi, sangat banyak dipengaruhi oleh ide-ide Neomarxis. Paham-paham Neomarxis, khususnya yang berasal dari Mahdzab Frankfurt dan Gramsci, menjelaskan bahwa memahami mengapa ketidakadilan terjadi tidak cukup karena memahami bagaimana mengakhiri ketidakadilan tersebut adalah yang paling penting. Sebagai “*true believers*”, kelompok teroris meyakini bahwa masyarakat yang lebih baik akan terwujud jika ancaman-ancaman tertentu dapat dimusnahkan. Bagi kaum Marxis, ancaman itu datang dari kaum borjuasi yang mengeksploitasi, bagi kaum nasionalis, ia datang dari kelompok minoritas dan pengungsi luar negeri, bagi kaum kapitalis, ancaman itu datang dari kaum-kaum buruh yang terindikasi melakukan revolusi. Bagi kelompok teroris, ancaman ini berasal dari tekanan represif dari sistem yang korup dan menjadi sumber krisis sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bahasa Viotti-kauppi, ideologi melawan terorisme “*can be characterized essentially as a reactionary (or backward-looking) ideology of the extreme right as opposed to a progressive (or forward-looking) ideology of the extreme or radical left*” (Paul Viotti & Mark Kauppi, 2007: 282). Secara ideologi, terorisme dapat dimaknai dari dua sudut pandang, yaitu sebagai subjek dan objek dari krisis.

Faktor lingkungan, menjadi substansi yang menjelaskan dimana terorisme secara umum bangkit (atau dibangkitkan) oleh dua keadaan yaitu *grievances*

dan *culture of violence*. Efek ini eksis baik lewat permasalahan sosial, politik, atau ekonomi. Keadaan-keadaan ini memotivasi orang baik dalam bentuk individu dan/atau kelompok melakukan pemberontakan sebagai rasa kecewa terhadap suprastruktur sebuah sistem, bisa Negara bisa sistem internasional. Keadaan yang kedua, kultur tindak kekerasan yang terus menerus diciptakan oleh suprastruktur sebuah sistem (nasional, regional, internasional) mengakibatkan komunitas-komunitas yang telah mengalami *high levels of intercommunal violence of years*, menjadikan kekerasan (bukan perdamaian) sebagai sebuah norma (Paul Viotti & Mark Kauppi, 2007: 286).

Penelitian Terdahulu

Apakah penggunaan kekerasan (militer) efektif dalam merespon terorisme? Boaz Garnor dan Paul Rogers pada Richard Jackson dan Samuel J. Sinclair dalam "*Contemporary Debates on Terrorism*" berbicara mengenai kekerasan dan militer untuk menghadapi terorisme. Ada dua pandangan dalam perdebatan mengenai penanganan terorisme dengan cara supresi (kekerasan) dan kekuatan militer. Pertama, Boaz Ganor setuju untuk menggunakan kekuatan militer (*the use of force*) untuk memerangi Terorisme. Kedua, datang dari Paul Rogers yang tidak setuju mengingat kegagalan negara menggunakan militer dalam memerangi terorisme beberapa tahun yang lalu (*wars on terror—learning the lessons of failure*).

Argumen yang setuju dengan respon melalui kekuatan militer memiliki empat landasan utama mengapa negara harus menggunakan kekuatan militernya dalam memerangi terorisme (Richard Jackson & Samuel Justin Sinclair (eds), 2012: 137). Pertama, Terorisme adalah produk dari dua variabel yaitu motivasi dan kapabilitas. Motivasi terror ini kemudian difasilitasi dengan kapabilitas-kapabilitas yang dimiliki dan dikembangkan oleh gerakan teroris. Kapabilitas yang paling utama dari kelompok teroris adalah kekuatan militernya. Untuk melawan terorisme, kapabilitasnya harus dilumpuhkan dan tentu saja dengan penggunaan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer dapat

memusnahkan kapabilitas teroris tersebut dan melumpuhkan motivasi gerakannya. Kedua, pola serangan teroris yang proaktif dan reaktif membuat negara harus siap siaga merespon serangan-serangan ini. Negara harus menggunakan kekuatan militernya untuk menghadapi ancaman yang tidak terprediksi dan terencana dari gerakan teroris. Ketiga, pertimbangan *cost-benefits* penggunaan strategi operasi ofensif antara lain: 1) kekuatan militer berguna untuk menggagalkan serangan terencana dari teroris; 2) kekuatan militer dapat mengacaukan aktivitas rutin dan operasional teroris; 3) efek boomerang atau serangan balik terhadap teroris; 4) menghadapi keterlibatan kelompok teroris lain; 5) meningkatkan dukungan operasi lokal dan internasional; 6) efek pada moral anggota organisasi, pendukung, dan negara tempat bernaungnya teroris; 7) dilemma intelijen. Landasan yang keempat, Legalitas dan Moralitas. Terorisme dipandang sebagai tindak kriminal oleh karena itu operasi ofensif melawan tindak kriminal tersebut memiliki legitimasi dan nilai moral yang tinggi sebagai operasi yang legal dan bermoral.

Argumen yang tidak setuju berpijak dari kegagalan-kegagalan negara dalam memerangi terorisme dengan menggunakan kekuatan ofensif (militer). Penggunaan strategi operasi militer pasca 9/11 "*War on Terror*" di sejumlah negara di Timur Tengah yang diduga menjadi "sarang teroris" justru memberikan kerugian besar bagi Negara sendiri (Amerika Serikat). Terminasi rezim Taliban dan al Qaeda di Afghanistan tahun 2001 dan terminasi rezim Saddam Husein di Iraq tahun 2003 tidak dapat menghentikan perkembangan gerakan al Qaeda yang semakin besar. Lalu, kasus Iraq justru melahirkan gerakan terorisme baru bernama ISIS. Kasus-kasus serangan teroris tetap terjadi.

Kegagalan-kegagalan materil dan psikis yang dihadapi oleh negara kontra-teroris yang menggunakan cara-cara supresif dan militer menuntut perlunya paradigma baru dalam memandang keamanan yang harus difokuskan kepada keamanan berkelanjutan yang berakar pada emansipasi dan keadilan terhadap kaum marjinal, bukan pada pemeliharaan status quo. Ada tiga kondisi yang harus benar-benar diperhatikan oleh negara yang dapat menjadi penyebab gerakan terorisme lahir dan berkembang (Richard Jackson & Samuel Justin

Sinclair (eds), 2012: 149). Jika negara mampu mengatasi tiga tren kondisi ini maka terorisme dapat dihadapi/dilawan/dimusnahkan tanpa jalan kekerasan. Tiga tren tersebut antara lain: 1) ekonomi neo-liberal menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan ekonomi; 2) perekonomian yang tidak merata mengakibatkan pendidikan yang tidak merata secara kuantitas dan kualitas; dan 3) kerusakan lingkungan yang berdampak pada keterbatasan perkembangan manusia. Tiga tren ini dapat memicu peningkatan konflik baik horizontal maupun vertikal. Terorisme dapat lahir dan berkembang dalam situasi-situasi ini. Oleh karena itu negara tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan jika dapat mengatasi tiga tren tersebut. Emansipasi dan keadilan dapat menjadi solusi bagi terorisme.

Berkembang dan semakin kuatnya terorisme internasional juga tidak luput dari perubahan dasar-dasar (*nature*) dari terorisme itu sendiri. Terorisme layaknya, entitas politik internasional lainnya yang berkembang, juga ikut berkembang. Viotti-kauppi mengenalkan sebuah teori *The Changing Nature of Terrorism*. Teori ini menegaskan adanya evolusi *who, why and how of terrorism* (Richard Jackson & Samuel Justin Sinclair (eds), 2012: 287). Pertanyaan pertama ialah, *who is terrorists?* Awalnya teroris difokuskan kepada kelompok-kelompok yang mewakili sebuah ideologi tertentu seperti Marxis-leninis, nasionalis-separatis, fascist, religious (ekstrimis). Biasanya datang dengan embel-embel sebagai “*army*”, “*brigade*”, atau “*command*”. Namun kemudian berevolusi menjadi sebuah gerakan *ad hoc* atau *transient groupings*, yakni sebuah entitas yang datang dengan tujuan bersama untuk mewujudkan atau menjalankan sebuah operasi tertentu. Evolusi ontologis tentang terorisme kemudian terfokus pada “siapa di balik” teroris tersebut sebagaimana yang disebut oleh Viotti-kauppi sebagai *privatization of terrorism*. Sehingga muncul asumsi bahwa menaklukkan terorisme adalah sama dengan menaklukkan siapa/apa yang ada di balik teroris tersebut (Richard Jackson & Samuel Justin Sinclair (eds), 2012: 288). Asumsi ini berangkat dari logika bahwa entitas politik seperti teroris tidak mungkin dapat berdiri sendiri baik secara ekonomi dan kekuatan militer.

Pertanyaan kedua, *why terrorism?* menjelaskan bahwa teroris telah berkembang dari waktu ke waktu dari segi sebab, motif, dan tujuannya. Pergeseran telah berubah dari yang awalnya hadir dengan pesan agenda politik tertentu, kemudian beralih ke dua arah, sebagai sebuah gerakan pembebasan dan menebar rasa takut (Richard Jackson & Samuel Justin Sinclair (eds), 2012: 291). Pertanyaan pendekatan yang ketiga, *how terrorists work?* Viotti-kauppi menjelaskan bahwa teroris bekerja sesuai dengan perkembangan zaman baik dari segi teknologi, alutsista atau persenjataan yang digunakan, dan juga mengikuti perkembangan isu-isu internasional. Beberapa jaringan terorisme bahkan juga telah menguasai *nuclear power plant* dan laboratorium persenjataan.

Viotti dan Kauppi kemudian menjelaskan respon-respon untuk menanggulangi terorisme dalam bentuk strategi ideal antara lain (Richard Jackson & Samuel Justin Sinclair (eds), 2012: 292-293):

1. *Eliminate the Underlying Causes of Terrorism.* Beranjak pada penyebab tumbuh dan berkembangnya sebuah gerakan terorisme, Negara harus mencermati faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama perilaku terror muncul.
2. *Counterattack (military operation) against Terrorism.* Terorisme yang identik dengan persenjataan dan tindak kekerasan mengharuskan siapapun yang ingin mengalahkan teroris juga harus dengan persenjataan yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas.
3. *Impose the Rule of Law.* Demokratisasi dinilai sebagai solusi bagi permasalahan terorisme. Asumsi-asumsi ini beranjak dari pemikiran bahwa kondisi yang tidak demokratis mengakibatkan ketidakadilan muncul dan memicu tindak terorisme.

Encourage International Cooperation. Perlunya gabungan Negara-negara dunia dalam menghadapi terorisme sebagai musuh bersama dan dapat ditaklukkan secara bersama-sama pula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan aspek lain secara holistik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif dan komprehensif. Deskriptif karena menggambarkan secara spesifik suatu situasi, sosial setting, ataupun suatu hubungan, dan analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen (Lawrence Neuman, 2000: 19).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Pada umumnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode kualitatif cukup beragam, diantaranya observasi, wawancara, studi pustaka, dan materi audio-visual. Namun demikian, dalam penelitian ini, peneliti mencukupkan pada teknik pengumpulan data studi pustaka dan tidak menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan materi audio-visual, mengingat sejumlah kendala seperti bahasa dan keterbatasan waktu serta biaya. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumen, baik dokumen yang bersifat umum seperti laporan dan media cetak, atau dokumen yang bersifat pribadi seperti jurnal pribadi dan surat (J.W. Creswell, 2009: 181). Data-data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dianalisis serta disajikan dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara logis dan komprehensif. Objek penelitiannya pun diuraikan secara terperinci, sistematis, dan runtut sesuai dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan di awal penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif interpretatif. J.W Creswell menerangkan bahwa interpretasi data dilakukan dengan cara mengartikan, menterjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang masyarakat yang diteliti (J.W. Creswell, 2009: 335). Terdapat setidaknya enam langkah menurut Craswell dalam

melakukan Analisa penelitian kualitatif yaitu: *pertama*, mempersiapkan data yang akan digunakan; *kedua*, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah dikumpulkan; *ketiga*, mengolah data untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan; *keempat*, mengaitkan seluruh hasil pembagian untuk kemudian dideskripsikan; *kelima*, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan *keenam*, menginterpretasikan makna dari data yang sudah disajikan.

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis *Library Research* yang mengambil Timur Tengah sebagai fokus kawasan penelitian dan ISIS sebagai objek penelitian. Proses pengambilan data dilakukan di sejumlah situs literatur yang berkaitan dengan studi kasus penelitian. Secara teknis, pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian dilakukan di kota Pekanbaru. Penelitian ini diproyeksikan untuk dapat diselesaikan hingga pada tahap penerbitan luaran dalam waktu paling lama sekitar enam bulan, dan paling cepat empat bulan terhitung dari akhir bulan Februari 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun mendiskusikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan dan kerumitan dalam mengalahkan terorisme ISIS meskipun telah melibatkan enam puluh tiga Negara dalam Koalisi Global. Pembahasan tidak jauh dari respon ideal yang ditawarkan oleh teori Viotti dan Kauppi tentang perilaku Koalisi Global terhadap ISIS. Pembahasan akan ditutup dengan kritik penulis terhadap kasus yang bersangkutan ditambah dengan pendapat para ahli yang juga sebelumnya telah membahas tentang terorisme dan/atau ISIS.

Bagaimana Terorisme Mampu Bertahan sebagai Sebuah Gerakan dan Ideologi?

Menurut teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dijelaskan bahwa penyebab lahir dan berkembangnya sebuah paham terorisme memiliki kesamaan dengan lahir dan berkembangnya sebuah gerakan ekstrimis ideologi apapun. Namun, jika dulunya dunia mengenal fasisme/ultra nasionalisme, marxis-leninisme, anti-semitisme, anti-islam, dan lain-lain, kini perkembangan sejarah menetapkan

bahwa teroris dan terorisme adalah *defining moment* saat ini bagi dunia internasional.

Perumusan faktor psikologi/sosial, ideologi, dan lingkungan menghasilkan tiga *nature* dan perubahannya pada ISIS. Penulis menawarkan tiga substansi yang membuat ISIS lahir, berkembang, dan bertahan hingga saat ini antara lain: 1) *ISIS "Normality"*; 2) *Ending Justice Ideology*; dan 3) *Grievances and Culture of Violence* atau penulis sederhanakan menjadi *Corrupted System* yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang ini. Tiga substansi ini adalah tesis yang penulis ajukan bahwa Koalisi Global kurang memperhatikan kondisi-kondisi sistemik yang menciptakan ISIS lahir, berkembang, dan bertahan. Koalisi Global terlalu memfokuskan diri pada ISIS dan segala aktivitasnya dengan pendekatan operasi militer berupa *air strikes* dan konfrontasi angkatan darat.

Pertama, normalitas ISIS yang membenarkan tindakan teror adalah hasil dari guncangan sosial dan psikis dari suprastruktur (pemerintah Timur Tengah, dan di luar Timur Tengah yang berkaitan). *One thing in most terrorists have in common is their normality*. Kelompok ISIS adalah kelompok yang menganut syariat Islam dengan cara yang berbeda. Konsep "*Jihad Qital*" dijadikan sebagai preteks untuk melakukan aksi terror dengan tafsiran bahwa kondisi yang dihadapi oleh ISIS adalah kondisi yang diwajibkan untuk menjalankan perang. Orang-orang yang hidup di Iraq dan merasakan kepahitan sebagai manusia yang dijajah oleh sebuah sistem akan tergiur untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajah layaknya pejuang-pejuang Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ketika hidup tidak berarti, mereka merasa mati sebagai *syuhada* akan menjadi kebanggaan dan arti tersendiri sebagai "*Defender of The Community*". Perasaan ini adalah perasaan yang tentunya hanya bisa dirasakan oleh ISIS sendiri.

Fawaz A. Gerges, professor Hubungan Internasional dan Politik Timur Tengah, *London School of Economics and Political Science* dalam "*ISIS and the Third Wave of Jihadism*" menyatakan bahwa penyebab tak terkendalinya ekstrimisme ISIS terletak pada kelahirannya di Al-Qaeda di Iraq (AQI), yang didirikan oleh Abu Musab Al-Zarqawi, yang terbunuh oleh Amerika Serikat pada

tahun 2006. Invasi Amerika Serikat dan okupasi di Iraq menyebabkan sebuah perpecahan di masyarakat Iraq yang sebelumnya juga sudah mengalami kerusakan akibat perang dan sanksi ekonomi selama beberapa decade (Fawaz A. Gerges, 2014: 339). Kerusakan yang diakibatkan atas serangan Amerika Serikat ke Iraq menyebabkan sebuah trauma besar bagi masyarakat Iraq. Trauma ini mengakibatkan krisis sosial di Iraq dan pemerintahan boneka bentukan Amerika Serikat (*Kurdistan Government of Iraq*) menyebabkan lahirnya ISIS sebagai bentuk gerakan protes terhadap pemerintah. Sunni Iraq yang termarginalisasi dan didiskriminasi oleh pemerintahan (syi'ah) pasca okupasi Amerika Serikat akhirnya menciptakan permulaan ISIS menginstrumentalisasi kekecewaan dan trauma ini dalam bentuk aksi terror.

Kedua, Pengaruh ideologi. Ideologi-ideologi tentang ketidakadilan dan cara memusnahkannya banyak datang dari ideologi Marxis-leninisme yang disandingkan dengan tafsiran dalil-dalil agama yang memerintahkan untuk menyatakan perang bagi siapapun yang memerangi atas dasar untuk melawan ketidakadilan. Lebih jauh lagi, Richard Barret dalam "*The Islamic State*" menjelaskan bahwa ideologi ISIS memiliki kesamaan dengan ideologi purifikasi Islam yang dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang berkembang pada abad ke 18 (Richard Barret, 2014: 18). Ideologi ini dikenal dengan nama Salafi, dan/atau Wahabi dari Arab Saudi yang sampai saat ini masih jadi perdebatan apakah Salafi dan/atau Wahabi adalah paham yang ekstrem. Karena gerakan-gerakan salafi banyak menyebar di seluruh penjuru dunia dan kekerasan fisik bukanlah *track record* dari gerakan ini. Arab Saudi sebagai representasi paham salafi internasional juga menyatakan bahwa ISIS bukan Islam dan jelas bukan salafi.

Untuk kasus ISIS, pandangan *Critical Theory* dapat menilai bahwa apa yang dilakukan ISIS sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh kaum buruh yang melancarkan revolusi melawan kaum-kaum borjuis yang dianggap telah mengeksploitasi. Oleh karena itu, teroris tidak pernah melihat diri mereka sebagai teroris. Bruce Hoffman dalam "*What is Terrorism*" menyatakan,

“The terrorists, by contrast, will never ‘acknowledge’ that he is a terrorist and moreover will go to great lengths to evade and obscure any sch inference or connection. The terrorists will always argue that it is society or the government or the socio-economic system and its laws that are the real terrorist, and moreover that if it were not for this oppression, he would not have felt the need to defend either himself or the population he claims to represent” (Robert Art & Robert Jervis, 2009: 176).

Berdasarkan pemaparan Hoffman, dapat dipahami bahwa ideologi terorisme sejatinya adalah ideologi “perlawanan terhadap penindasan”. ISIS menganggap bahwa Amerika Serikat dan sekutunya lewat Iraq melakukan penindasan dan kolonialisme baru di Timur Tengah. ISIS justru menganggap bahwa Amerika Serikat dan sekutunya lah teroris yang sebenarnya. Ketika ISIS disalahkan atas pembunuhan orang-orang tidak berdosa, mereka kembali mempertanyakan “bukankah yang terbunuh di Afghanistan, Iraq, Suriah, Palestina, dan lain-lainnya juga bukan orang yang tidak berdosa? apakah semua yang mati di sana adalah para pendosa yang pantas mati? Apakah mereka juga teroris? Apakah kita semua adalah teroris?” Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang penulis nilai tidak berhasil ditangkap dengan baik oleh Koalisi Global dalam mengenali musuhnya (ISIS). Koalisi Global hanya menilai ISIS sebagai musuh kombatan yang harus dimusnahkan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Koalisi Global tidak melihat sisi-sisi yang sebenarnya dijadikan sebagai “pesan” bagi kelompok ini. “pesan” ini lah yang tidak ditangkap dengan bijaksana.

Ketiga, kultur kekerasan. ISIS adalah gejala dari rusaknya sistem politik di Timur Tengah dan delegitimasi institusi Negara, yang secara bersamaan berkembang dan menyebar dengan perang sipil di Suriah dan Iraq. Gerges menyatakan bahwa ISIS sejatinya mengisi kekosongan legitimasi kekuasaan di Timur Tengah. Kultur kekerasan dan rusaknya sistem di Timur Tengah, mengakibatkan lambat laun, Timur Tengah berubah menjadi sebuah sistem yang “terbiasa” dengan kekerasan. Noam Chomsky dalam “*The Islamic State is One of The “Main Effect” of US Invasion of Iraq*” menyatakan, “*They’re not coming out of*

nowhere, I mean, they are—one of the effects, the main effects, of the US invasion of Iraq...Now, this cannot be dealt with by bombs because violent is their culture that US has created” (Noam Chomsky, 2015). ISIS yang terbiasa dengan kekerasan akan merasa bahwa kekerasan adalah cara yang biasa dan harus digunakan untuk melawan yang dianggap teroris yang sebenarnya menurut ISIS. Sistem yang sarat dengan kekerasan akan menjadikan kekerasan itu sendiri sebagai sesuatu yang lumrah.

Pada intinya, faktor psikologis/sosial, ideologi, dan kultur kekerasan dan rasa kekecewaan yang mendalam dari masyarakat Timur Tengah adalah tiga sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat sebuah sistem korup yang diciptakan sendiri oleh suprastruktur-suprastruktur di Timur Tengah. ISIS ibarat longsor yang terjadi karena manusia suka menebangi pohon-pohon tanpa batasan dan aturan. Pohon-pohon yang ditebang ini dapat dimaknai sebagai keadilan yang dipangkas terus menerus hingga akhirnya terjadi longsor dalam bentuk “wajah” ISIS yang lahir dan berkembang serta bertahan hingga saat ini.

Teroris telah berkembang dari waktu ke waktu dari segi sebab, motif, dan tujuannya. Pergeseran telah berubah dari yang awalnya hadir dengan pesan agenda politik tertentu, kemudian beralih ke dua arah, sebagai sebuah gerakan pembebasan dan menebar rasa takut. Viotti-kauppi menjelaskan bahwa teroris bekerja sesuai dengan perkemangan zaman baik dari segi teknologi, alutsista atau persenjataan yang digunakan, dan juga mengikuti perkembangan isu-isu internasional. Beberapa jaringan terorisme bahkan juga telah menguasai *nuclear power plant* dan laboratorium persenjataan.

Ini menandakan bahwa Teroris tidak hanya lahir dan berkembang begitu saja, ia mengikuti perkembangan dari segala lini dan memanfaatkannya sebagai faktor-faktor yang membuat gerakan terorisme menjadi lebih kuat. Inilah yang juga terjadi pada ISIS. ISIS dengan kepemilikan *nuclear power plant* secara teknologi menjadi lebih kuat dari segi persenjataan. Motif ISIS yang saat ini beragam juga menandakan bahwa ISIS telah berevolusi menjadi sebuah gerakan terorisme baru. Perseteruannya dengan gerakan-gerakan pembebasan Islam lain di Timur Tengah juga menandakan bahwa motif ISIS telah

berubah/berkembang menjadi bentuk yang baru. Ia tidak lagi menjadi gerakan pembebasan, kini telah berubah menjadi gerakan penyebar ketakutan tak hanya kepada musuh namun juga kepada gerakan pembebasan Islam lainnya.

Melawan Teroris dan Terorisme

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Viotti-kauppi menawarkan empat strategi ideal dalam menghadapi terorisme yaitu: 1) mengeliminasi sebab-sebab munculnya terorisme; 2) *counter attack against terrorism*; 3) *impose the rule of law*; dan 4) membangun kerjasama internasional. Berdasarkan teori ini penulis merumuskan strategi ideal ini dengan fakta yang terjadi saat ini pada Koalisi Global. Berdasarkan ini, usaha-usaha yang dilakukan oleh Koalisi Global yang dipimpin oleh Amerika Serikat adalah: 1) Mengeliminasi paham-paham ekstrimis sebagai sumber dari terorisme (Grame Wood, 2015); 2) Operasi militer sebagai instrument *counter attack* (Harleen Gambhir, 2015); 3) Demokratisasi di Timur Tengah sebagai perwujudan menciptakan perdamaian di Timur Tengah; dan 4) Membangun Koalisi Global yang terdiri dari enam puluh tiga Negara untuk memerangi ISIS (Justine Drennan, 2014).

Pertama, ekstrimisme agama. Apakah memang benar ekstrimis agama yang menyebabkan terorisme? Berdasarkan Oxford Dictionary, ekstrimisme dapat didefinisikan sebagai "*ideas or actions that are extreme and not normal, reasonable or acceptable to most people*". Dilanjutkan dengan definisi menurut Peter T. Coleman dan Andrea Bartoli dalam "*Addressing Extremism*" mengatakan bahwa ekstrimisme adalah fenomena yang kompleks, dan kompleksitasnya sulit untuk dimengerti. Ia bisa didefinisikan sebagai aktivitas (kepercayaan, sikap, perasaan, aksi, dan strategi) dari sebuah karakter yang *far removed from the ordinary* (Peter T. Coleman & Andrea Bartoli, 2009: 3-4). Amerika Serikat dan Koalisi Global sering menggunakan kata ekstrimisme dan radikalisme ketika membicarakan ISIS baik lewat pidato resmi kenegaraan ataupun perbincangan-perbincangan non-formal. Namun, yang tidak diperhatikan ialah, mengapa ekstrimisme agama ini lahir? Tidak mungkin sebuah

ideologi lahir begitu saja. Agama (Islam) sulit untuk dinilai mengajarkan nilai-nilai ekstrimisme karena ada pemeluk agama yang tidak berdiri pada posisi dan kondisi yang ekstrem.

Penulis menilai bahwa Negara-negara gagal Arab lah yang membiarkan ISIS tumbuh dan tanpa disadari Negara-negara korup ini telah lama menggunakannya (ekstremisme, ketidakadilan, dan krisis sosio-ekonomi-politik) untuk kepentingan politik tertentu jauh sebelum orang-orang mengenal atau mendengar nama Abu Bakr al Baghdadi. Artinya ada sebuah kesalahpahaman apakah ISIS merupakan penyebab kerusakan di Timur Tengah atau kerusakan itulah yang melahirkan ISIS? Kawa Hassan, peneliti senior *Carnegie Endowment Middle East Center* dalam "*Islamic State is a Consequence Not a Cause of the Current Catastrophe*" menyatakan bahwa ISIS tidak lahir begitu saja, untuk memahami ISIS saat ini "*we need to go back to the beginning of 2000, After 9/11 and 2003, both the Syirian and Iranian regimes saw and used al Qaeda as a 'potental ally' in their conflict with United States but, simultaneously, viewed it as a dangerous enemy*" (Kawa Hassan, 2014).

ISIS tidak lahir dengan sendirinya. Dalam bahasa Kawa Hassan, "*the outrageous carelessness and scandalous double-standards of international community towards the Syirian conflict has led to Syirian heartbreak*". Sama halnya dengan pemerintahan Kurdistan di Iraq pasca okupasi Amerika Serikat dinilai tidak dapat menciptakan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang inklusif. Akhirnya, Iraq semakin terpisah oleh isu-isu sektarianisme antara *Sunni Iraqi* dan *Kurdistan Iraqi*. Pihak-pihak yang "tersakiti" baik di Suriah maupun di Iraq berangkat dari "kekecewaan" merasa bahwa melakukan perlawanan adalah cara yang tepat. ISIS tidak hanya merupakan wajah kekecewaan dari *Sunni Iraqi*, ia juga wajah dari persaingan dan standar ganda suprastruktur-suprastruktur di Timur Tengah, baik secara vertikal, maupun horizontal.

Selanjutnya, Kawa Hassan menjelaskan terdapat lima faktor mendasar yang membentuk dan mempertahankan akar sosio-ekonomi, kultur, dan akar politik dari radikalisme. Pertama, *geopolitical manipulation and facilitation of terrorist groups by secular and religious authoritarianism alike*. Timur Tengah

adalah daerah konflik yang sarat dengan perang saudara. Suprastruktur (sekuler maupun relijius) sering menggunakan dan memfasilitasi gerakan-gerakan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan represif. Mesir antara Abdul Fatah dan as Sisi dan Ikhwanul Muslimin yang sudah ditetapkan sebagai teroris oleh Mesir adalah salah satu contoh bagaimana as Sisi memanfaatkan kubu oposisi (yang berada di luar IM seperti: kelompok liberal, koptik, dan lain-lain) untuk menekan krisis di Mesir yang berujung dengan lengsernya Mohammad Morsi setelah dipilih menjadi presiden lewat proses demokrasi pertama di Mesir. Ikhwanul Muslimin yang merasa “dipecondangi” oleh sistem akhirnya melakukan protes. Protes ini pun disambut dengan hujan tembakan oleh pihak pemerintah lewat militer Mesir. Kondisi-kondisi yang merusak ini akhirnya menciptakan “kebencian” terhadap sistem yang jika terus dibiarkan akhirnya dapat berubah menjadi sebuah gerakan terorisme.

Kedua, Kawa Hassan menjelaskan bahwa buku-buku sejarah yang dogmatis dan kurikulum sekolah-sekolah yang menomorsatukan kemutlakan sebuah kekhalifahan. Kekhalifahan adalah sebuah perintah dalam Islam. Karena di dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa penciptaan manusia adalah sebagai “Khalifah” di muka bumi. Artinya, pemeliharaan Bumi dan seluruh isinya adalah makna inti dari sebuah kekhalifahan. Kekhalifahan juga memiliki arti praktis sebagai bentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan Syari’at Islam. Penulis menilai apa yang terjadi pada ISIS ialah, ISIS merasa bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka Bumi ini adalah tanda bahwa manusia-manusia di dunia sudah tidak lagi mengindahkan perintah tuhan, maka ISIS merasa wajib untuk menjalankan kekhalifahan tersebut.

Ketiga, selama beberapa dekade, di Timur Tengah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran bersifat kekerasan terhadap HAM, wacana-wacana intoleran, dan “*hate speech against others*” yang dibuat oleh autokrasi, organisasi berpengaruh, dan kepribadian-kepribadian antara kaum sekuler dan relijius di Timur Tengah. Keempat, ketidakadilan sosial yang terjadi di Timur Tengah lewat “*crony capitalism, and ubiquitous corruption at the highest levels of authority*”. Brutalitas al-Baghdadi dan ISIS tidak lahir dari sebuah kevakuman

(dengan sendirinya), yang terjadi di Timur Tengah. Brutalitas al-Baghdadi dan ISIS tidak lahir dari sebuah kevakuman (dengan sendirinya), *“they build on, are logical conclusions of and take to the ultimate unimaginable barbarism the official public beheadings in Saudi Arabia, official public executions and public stoning to death in Iran, and the razing to the ground of entire cities and communities by Ba’ath parties in al Assad’s Syria and Saddam’s Iraq as well as Gaddafi’s barbarism against Libyans”* (Kawa Hassan, 2014).

Seluruh faktor ini terjadi karena faktor yang terakhir sebagai faktor yang membuka “gerbang” krisis di Timur Tengah. Faktor tersebut adalah instrumentalisasi gerakan pembebasan (sebelum disebut sebagai gerakan teroris; al Qaeda, ISIS, Al Nusra, IM, dll) oleh Negara-negara *superpower* yang berada di luar Timur Tengah. Intervensi Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan lain-lain ke Timur Tengah atas nama *“Peace building, peace keeping, Responsibility to Protect, dll”* justru hanya menambah kerusakan-kerusakan yang ada. Amerika Serikat tidak dipungkiri membiayai dan melatih Osama bin Laden untuk berperang (*buck-passing* dan/atau *proxy war*) melawan Soviet di Afghanistan saat Perang Dingin (Jerome Roos, 2014).

Al Qaeda yang semakin besar kapasitasnya, mulai merasa Amerika Serikat hanya ingin menguasai (minyak) Timur Tengah ditambah dengan kekecewaan mereka atas standar ganda Amerika Serikat pada kasus Palestina-Israel. Jerome Roos dalam tulisannya mengatakan:

“Now, in one of the greatest ironies of all, the United States finds itself back in Iraq, eleven years after its original invasion, bombing its own tanks, its own artillery pieces, and its own armored personnel vehicles — once provided to the Iraqi army during the eightyyear occupation and summarily seized by ISIS as it sacked deserted bases across western Iraq — to stem the advances of an extremist enemy that its own imperial misadventures gave rise to. Once again, the US and its allies have created a monster they can no longer control. Once again, they will go to war to try to eradicate it. And once again, they will probably end up making an even bigger mess in the process” (Jerome Roos, 2014)

Amerika dulu membiayai dan membesarkan al-Qaeda yang saat ini memicu lahirnya gerakan-gerakan serupa lainnya seperti ISIS yang juga secara historis adalah bagian dari al-Qaeda yang “dipelihara” oleh Amerika Serikat. Amerika telah menghidupkan bom waktunya sendiri di Timur Tengah. Tentunya, pemahaman ini masih *debateable* dan berpotensi untuk dikritisi, namun, penulis telah berusaha untuk melihat seobjektif mungkin bahwa realitas-realitas yang di tunjukkan oleh perilaku-perilaku Negara-negara besar dalam melawan ISIS dinilai tidak tepat sasaran dan cukup memberikan efek traumatik yang baru justru bagi umat-umat muslim sebagai *International Society*.

Sepertinya Amerika Serikat dan Koalisi Global, berdasarkan lima pemaparan ini tidak begitu mengenal apa, mengapa, dan bagaimana ISIS lahir, tumbuh, dan bertahan hingga sampai saat ini. Usaha-usaha Amerika Serikat untuk mengeliminasi *cause of terrorism* justru dinilai tidak tepat sasaran karena kesalahan memaknai ISIS sebagai sebuah konsekuensi dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di Timur Tengah, yang tidak bisa dipungkiri, tanggungan Amerika Serikat juga turut berkontribusi di kerusakan-kerusakan tersebut.

Operasi Kontra-Teror Koalisi Global dan Agenda Perdamaian Demokratik di Timur Tengah

Bruce Russet dan John O’Neal merumuskan pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tentang perdamaian menjadi sebuah teori yang disebut sebagai “*Kantian Peace Triangle*” (John R. Oneal and Bruce Russett, 1999: 1-37). Russet menjelaskan pemikiran Kant perlunya “*republican constitutions*”, a “*commercial spirit*” of international trade, dan “*federation of interdependent republics*” untuk menciptakan “*perpetual peace*”. Russet dan O’Neil merumuskan ini menjadi sebuah setiga teoritis yang terdiri dari tiga sudut konsep antara lain: 1) Demokrasi; 2) Organisasi Internasional; dan 3) Interdependensi Ekonomi. Tiga substansi ini menurut Russet dan O’Neil dapat menciptakan perdamaian dunia dan mempertahankan kevakuman atas perang antara Negara (Bruce Russett and John Oneal, 2001).

Penulis melihat bahwa terjadi pergeseran pada konsep Interdependensi Ekonomi khusus di kasus Timur Tengah dalam menciptakan perdamaian. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama dengan Koalisi Global lebih banyak bergerak pada operasi-operasi militer. Segitiga ini pun berubah menjadi 1) Demokrasi; 2) Organisasi Internasional; dan 3) Operasi Militer. Berangkat dari teori awal yang penulis gunakan (Viotti-kauppi: *Responses to Terrorism*) terdiri dari eliminasi sebab terjadinya terorisme yang sudah dijelaskan di awal, kemudian dilanjutkan dengan tiga respon lainnya.

Pertama, Demokrasi dan Demokratisasi. Tidak dipungkiri, bahwa Amerika Serikat datang ke Timur Tengah atas nama perdamaian dan demokratisasi sebagai instrument menuju perdamaian dunia. Ini layaknya *just war* bagi Amerika Serikat ke Iraq untuk membawa dan menyebarkan demokrasi di Timur Tengah. Pertanyaannya adalah apakah memang Demokrasi yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Timur Tengah? F. Gregory Gause III dalam "*Can Democracy Stop Terrorism?*" menyatakan bahwa Amerika Serikat menyebarkan demokrasi di Dunia Arab tidak hanya untuk menyebarkan nilai-nilai Amerika, namun juga untuk keamanan Amerika Serikat sendiri dengan maksud semakin tumbuhnya demokrasi di Dunia Arab, maka Timur Tengah akan berhenti menghasilkan ideologi-ideologi anti-Amerika yang dekat dengan terorisme (F. Gregory Gause, 2005: 62-76). Gause mengkritik bahwa terdapat empat alasan mengapa demokrasi belum tepat dijadikan sebagai solusi perdamaian di Timur Tengah. Alasan tersebut adalah:

1. *The Missing Link*. Tidak adanya korelasi yang ditemukan antara terorisme dan otoritarianisme. Karena terorisme bukanlah sebuah rezim layaknya otoritarianisme dan demokrasi yang bertolak belakang. Kejadian terorisme di Negara-negara demokrasi seperti di Itali (*Red Brigades*), Jepang (*Japanese Red Army*), Jerman Barat (*Baader-Meinhof Gang*) dan proses transisi demokrasi di Spanyol tidak berhasil mengalahkan *Euskadi Ta Askatasuna*. Demokrasi di Turki juga memberikan catatan sejarah kekerasan yang panjang yang bertahan hingga tahun 1970.

2. *Flawed*. Asumsi bahwa demokrasi akan mengurangi terorisme adalah adanya kompetisi terbuka bagi seluruh partisipan politik sehingga terorisme tidak akan berpotensi memimpin pemerintahan atau gerakan terorisme berubah menjadi gerakan yang demokratis. Namun, kritik terhadap ini justru partisipasi terbuka akan menjadi masalah baru bagi *war on terror* sendiri. Mungkin, gerakan teroris tidak akan menang atau mengubah ideologi radikal-ekstremnya, namun, jika tampuk kekuasaan sudah berada di tangan kelompok yang sudah berubah ini akan memunculkan pertanyaan, “apakah gerakan ini benar-benar demokratis?”. Bagi sebuah kelompok yang terbiasa bersembunyi dan berganti-ganti wajah, adalah suatu hal yang tidak sulit untuk melancarkan operasi dengan kedok demokrasi. Sama halnya dengan Negara-negara kapitalis Amerika Serikat dan sekutu yang datang ke Timur Tengah menguasai minyak lewat kedok “Demokrasi dan Investasi Langsung Luar Negeri”.
3. *Angry Voices*. Salah satu ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dinilai dapat membangkitkan nuansa toleransi di masyarakat Timur Tengah sehingga terorisme dapat ditekan. Namun pertanyaannya adalah, walaupun demokratisasi dapat mengurangi anti-Amerikanisme, tidak ada jaminan bahwa reduksi ini dapat meningkatkan *pro-American Government*. Kemungkinan terburuk adalah justru suara-suara kemarahan dan kebencian terhadap suprastruktur menjadi semakin meluas dan menyebar di seluruh penjuru Timur Tengah. Bahkan, terorisme pun berubah menjadi semakin kuat dan besar. Proyek demokratisasi di Iraq, Mesir, Libya, dan daerah pos-otoritarianisme lainnya justru menghasilkan otoritarianisme yang baru termasuk gerakan-gerakan separatis-terorisme.
4. *The Long Haul*. Di Timur Tengah perpolitikan juga dihiasi dengan kehadiran kelompok-kelompok non islamis yang terdiri dari liberal, sekuler, gerakan kiri, nasionalis dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok minoritas yang arah gerakannya sejalan dengan visi politik Amerika Serikat. Artinya, jika demokratisasi berjalan di Timur

Tengah lewat pemilihan umum. Amerika Serikat harus membantu kelompok-kelompok minoritas ini untuk dapat dominan di pemerintahan. Artinya Amerika Serikat akan mengkonfrontasikan kelompok Islamis dan non-Islamis dalam sebuah pecaturan politik. Asumsi awalnya adalah nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat akan mudah diterima oleh kelompok-kelompok non-Islamis yang minoritas. Penulis justru melihat ini sebagai potensi perang baru dalam dunia Arab. Terorisme yang sangat anti dengan “kekafiran” justru memiliki legitimasi baru untuk melancarkan serangan.

Empat pertimbangan oleh Gauss III ini justru memberikan pemahaman bahwa sangat sulit untuk memandang Demokratisasi sebagai sebuah solusi bagi Timur Tengah. Empat solusi “*Americans pushing democracy into Arab Worlds*” justru menjadi empat sumber masalah baru baik bagi Timur Tengah dan Amerika Serikat sendiri.

Sudut segitiga yang kedua, adalah Organisasi Internasional. Penulis melihat ada dua dimensi Organisasi Internasional di Timur Tengah dalam agenda *peace keeping* dan *peace building*. Pertama, adalah organisasi internal dari Timur Tengah sendiri seperti OKI dan Liga Arab sebagai representasi solidaritas umat Muslim Timur Tengah dan dunia internasional. Organisasi yang kedua adalah Koalisi Global melawan ISIS itu sendiri sebagai organisasi eksternal. Lemahnya legitimasi OKI dan Liga Arab dalam menyelesaikan masalah Palestina-Israel, Suriah, Iraq, Mesir, dll justru menambahkan kekecewaan dan keputusasaan rakyat-rakyat Timur Tengah akan harapan terhadap perdamaian. Koalisi Global yang terdiri dari enam puluh tiga Negara-negara termasuk Negara-negara besar juga tidak mampu membendung ISIS. Akhirnya muncul pemikiran-pemikiran berupa dugaan-dugaan bahwa ISIS mungkin memang untuk “diperangi” namun bukan untuk “dikalahkan”. ISIS malah menjadi legitimasi Negara-negara besar untuk melancarkan serangan ke Suriah dan daerah lain di Timur Tengah atas kepentingan tertentu layaknya Amerika Serikat dulu pasca 9/11 yang menjadikan Al-Qaeda sebagai legitimasi untuk

menginvasi Afghanistan dan Iraq yang saat ini menjadi perang yang disesali oleh Amerika Serikat sendiri dalam sejarah (Joseph E. Stiglitz & Linda J Bilmes, 2008).

Terakhir, Amerika Serikat dan Koalisi Global memaknai “*counterattack against terrorism*” dengan cara Operasi Militer. Pertanyaannya, apakah Operasi Militer mampu membumihanguskan “isme-isme tentang terorisme” itu sendiri? Operasi Militer mungkin dulu pernah menjatuhkan fasisme Jerman dan Jepang dua kali dalam catatan sejarah, Runtuhnya Uni Soviet yang membawa paham sosialis-komunis, juga diikuti dengan runtuhnya kekaisaran Ottoman sebagai representasi ideologi islamis. Namun, isme-isme ini tetap berkembang dan hadir di dunia internasional. Islamis masih tetap ada, sosialis-komunis, fasis-ultranasionalis, dan isme-isme lainnya masih tetap berdiri. Contoh yang lebih tepat ketika pemerintah Indonesia yang sudah tergolong demokratis, pada masa orde baru berusaha membumihanguskan ideologi komunis dengan asas tunggal, Pancasila. Sampai saat ini, komunisme masih bisa dipelajari dengan bebas di Indonesia meskipun secara legal-formal tidak bisa. Namun, bukan berarti isme-isme tersebut hilang dari peredaran. Membumihanguskan komunisme di Indonesia tidak ada bedanya dengan mensuperiorkan Pancasila. Yang satu mengeksploitasi yang lain.

Artinya, “isme-isme” ini mungkin bukanlah sesuatu yang harus dihancurkan apalagi dengan operasi militer. Ideologi sejatinya dapat didamaikan dengan cara-cara yang lebih harmonis. Maksudnya, ekstrimisme tidak akan muncul begitu saja tanpa ada kondisi yang melahirkannya. Penulis menilai bahwa operasi militer hanya akan memperparah kondisi dan tidak akan berhasil membendung isme-isme yang berbau ekstrimis dan radikal. Isme-isme tidak dapat dimusnahkan namun kelahirannya dapat dicegah. Ibarat orang tua yang memiliki anak cacat, mereka tidak akan dapat mengubah kecacatan itu selain hidup menerima kecacatan tersebut dengan bijak, namun sejatinya, kecacatan itu dapat tidak hadir jika anak itu tidak pernah dilahirkan. Jika Negara tidak dapat bersikap bijak terhadap eksistensi terorisme, maka akan lebih mudah untuk tidak menciptakan kondisi yang melahirkannya.

KESIMPULAN

Tulisan ini telah memaparkan sejumlah pertimbangan-pertimbangan tentang menyikapi eksistensi sebuah gerakan terorisme. ISIS adalah sebuah gerakan protes terhadap suprastruktur yang korup. Terorisme dan ISIS tidak lahir dari sebuah ketiadaan. Artinya, ada kondisi-kondisi yang disadari atau tidak, menjadi pemicu bom waktu yang saat ini telah meledak. Penulis menyimpulkan bahwa ketahanan ISIS justru diakibatkan oleh strategi Amerika Serikat dan Koalisi Global sendiri yang dinilai tidak tepat sasaran.

Amerika Serikat dan Koalisi Global terlalu egois dalam menyelesaikan permasalahan terorisme. Problem yang pertama, terletak pada kesalahan memahami ISIS dan terorisme. ISIS sering dianggap sebagai “musuh bersama” yang menjadi “penyebab” katastrof di Timur Tengah. Padahal, berdasarkan pemaparan penulis di awal, jelas terlihat bahwa ISIS sejatinya adalah “konsekuensi” yang harus diterima karena katastrof-katastrof yang terjadi di Timur Tengah. Sistem yang koruplah yang melahirkan ISIS, bukan ISIS yang merusak sistem sosial. Keegoisan Amerika Serikat sebagai pemimpin Koalisi Global terlihat pada catatan sejarah dimana Amerika Serikat sendiri yang pada awalnya membiayai Al-Qaeda untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat di Afghanistan dari invasi Uni Soviet. Amerika Serikat tidak menyadari bahwa pembiayaan dan dukungan terhadap gerakan teroris ini justru melahirkan “monster” baru bagi peradaban manusia.

Problem yang kedua, Amerika Serikat melihat ISIS dan terorisme dengan sudut pandang yang *american-centric* bukan *problem-centric*. Akhirnya, strategi menjadi tidak tepat sasaran, bahkan menjadi pemicu yang tetap membuat ISIS semakin berkembang dan bertahan. Demokratisasi dan Operasi Militer justru tidak berhasil menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Penulis melihat ada pergeseran pada *Kantian Peace Triangle* menjadi *Neo-kantian War Triangle* yang menjadi problem tersendiri dalam agenda menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Konsep “interdependensi ekonomi” yang berubah menjadi “operasi militer” menandakan bahwa perdamaian akan semakin tidak mungkin

terwujud dengan pendekatan militer. Timur Tengah tidak sedang berada di arah perdamaian. Operasi militer mungkin dapat mengalahkan atau membunuh seorang Abu Bakr al Baghdadi, namun operasi militer tidak akan dapat pernah mencegah lahirnya Baghdadi-baghdadi yang lain baik di Timur Tengah ataupun dunia internasional.

Teori penyebab dan respon ideal terhadap terorisme ala Viotti dan Kauppi justru belum mampu menjadi teori ideal dalam menaklukkan ISIS. Sebaliknya, respon-respon yang digunakan oleh Koalisi Global yang dikorelasikan dengan teori Viotti dan Kauppi, justru menambah ketahanan (*power*) dari ISIS itu sendiri. Temuan terakhir yang penulis dapatkan adalah berlakunya Segitia Kantian yang konsep “Interdependensi Ekonomi” bergeser menjadi “Serangan/Operasi Militer”. Timur Tengah justru membuang “Interdependensi Ekonomi” dan menggantinya dengan Operasi-operasi militer yang sejatinya tidak akan mendekatakan pada kata damai. Kesalahan Koalisi Global yang paling signifikan adalah ISIS dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan karena ia dinilai sebagai penyebab krisis-krisis di Timur Tengah, padahal fakta menjelaskan bahwa ISIS bukanlah penyebab, melainkan konsekuensi atas krisis-krisis yang terjadi yang disebabkan oleh korupsi sistem di Negara-negara gagal Jazirah Arab.

Sampai saat ini, Timur Tengah masih menjadi daerah konflik, dimana ISIS masih berkeliaran dan tentunya merencanakan strategi-strategi baru pasca tragedy *Paris Attack* November silam. Penulis masih bertanya-tanya dan menduga apakah ISIS memang lahir untuk diperangi namun tidak untuk dikalahkan?

REFERENSI

Barret, Richard. 2014. *The Islamic State*. Washington DC: The Soufan Group.

Callimachi, Rukmini. 14 Februari 2018. “*ISIS Claims Responsibility, Calling Attacks ‘First of the Storm’*”. New York: New York Times. Diakses dari http://www.nytimes.com/2015/11/15/world/europe/isis-claims-responsibility-for-paris-attacks-calling-them-miracles.html?_r=0 pada 14 Februari 2018 pukul 21.04 WIB.

- Chomsky, Noam. 2015. *The Islamic State is One of The "Main Effect" of US Invasion of Iraq*.
<http://ncronline.org/blogs/ncrtoday/noamchomskyislamicstateonemaineffectsusinvasioniraq> diakses pada 16 November 2015 pukul 1.32 WIB.
- Coleman, Peter T. & Bartoli, Andrea. 2009. *Addressing Extremism*. Columbia University Press. Hlm. 3-4. Diakses dari http://www.tc.columbia.edu/i/a/document/9386_WhitePaper_2_Extremism_030809.pdf pada 3 Mei 2018 pukul 10.56 WIB.
- Cowell, Alan. "Low Grade Nuclear Material Is Seized by Rebels in Iraq, U.N. Says". The New York Times. Diakses pada 12 Februari 2018 pukul 21.03 WIB.
- Cowell, Alan. "Low Grade Nuclear Material Is Seized by Rebels in Iraq, U.N. Says". The New York Times. Diakses pada 3 Mei 2018 pukul 21.03 WIB.
- Creswell, J.W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach* (USA: Sage Publications, 2009)
- Drennan, Justine. 12 Februari 2018. "Who Has Contributed What in the Coalition Against the Islamic State". Washington: ForeignPolicy.com. Diakses dari <http://foreignpolicy.com/2014/11/12/who-has-contributed-what-in-the-coalition-against-the-islamic-state/> pada 13 Februari 2018 pukul 00.28 WIB.
- Drennan, Justine. 12 November 2014. "Who Has Contributed What in the Coalition Against the Islamic State". Washington: ForeignPolicy.com. Diakses dari <http://foreignpolicy.com/2014/11/12/who-has-contributed-what-in-the-coalition-against-the-islamic-state/> pada 3 Mei 2018 pukul 2.41 WIB
- Gambhir, Harleen. July 2015. *Middle East Security Report: ISIS's Global Strategy: A Wargame*. Washington: Institute for the Study of War.
- Gause, F. Gregory III. 2005. *Foreign Affairs*. Vol. 84, No. 5 (September/Oktober 2005). *Can Democracy Stop Terrorism?*. Council on Foreign Relations Inc.
- Gerges, Fawaz A.. 2014. *ISIS and the Third Wave of Jihadism*. London: Current History. Hlm. 339. Lebih lanjut lihat *The Far Enemy: Why Jihad Went Global* (Cambridge University Press, 2005) dan, *The New Middle East: Protest and Revolution in the Arab World* (Cambridge, 2014).
- Gordon, Philip H. *Can the War on Terror Be Won?* Dalam Robert Art dan Robert Jervis. 2009. *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues 9th Edition*. New York: Pearson-Longman.
- Hassan, Kawa. 2014. *Islamic State is a Consequence Not a Cause of the Current Catastrophe*. Annahar: Carnegie Middle East Center. Diakses dari <http://carnegiemec.org/2014/09/04/islamicstateisconsequencenotaauseofcurrentcatastrophe/hnw2> pada 3 Mei 2018 pukul 11.23 WIB
- Hoffman, Bruce. *What is Terrorism* dalam Robert Art & Robert Jervis. 2009. *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. New York: Pearson Longman.
- Institute for the Study of War, US Central Command dalam "Battle for Iraq and Syria in Maps". 6 Februari 2018. Washington: BBC News. Diakses dari

<http://www.bbc.com/news/worldmiddleeast27838034> pada 13 Februari 2018 pukul 00.05 WIB.

Jackson, Richard & Sinclair, Samuel Justin (eds). 2012. *Contemporary Debates on Terrorism*. London: Routledge.

Neuman, W. Lawrence., *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston-London, Allyn and Bacon, 2000)

Oneal, John R. and Russett, Bruce. 1999. World Politics Vol. 52 No. 1 (Oct 1999). "*The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, Interdependence, and International Organizations*". Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 1-37

Oxford Dictionaries Language Matters. Diakses dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/extremism> pada 16 November 2015 pukul 10.56 WIB.

Reuters. 14 Februari 2018. "*Hollande: Paris attacks 'act of war', ISIS behind them*". Diakses dari <http://www.jpost.com/International/ISIS-video-threatens-France-a-day-after-Paris-bloodshed-433019> pada 14 Februari 2018 pukul 21.04 WIB

Roos, Jerome. 18 Agustus 2014. "*The Islamic State: a Monster US Empire Created*". ROAR Magazine. Diakses dari <http://roarmag.org/2014/08/islamicstateinvasioniraq/> pada 3 Mei 2018 pukul 13.17 WIB. Jerome Roos adalah *Phd Researcher* di Institute Universitas Eropa di bidang Ekonomi Politik Internasional.

Russett, Bruce and Oneal, John. 2001. *Triangulating Peace: Democracy, Interdependence and International Organizations*. New York: W.W Norton & Company, Inc.

Sanderson, Thomas M., 2015. *The Challenge of Deterring ISIS*. New York. Global Forecast.

Stiglitz, Joseph E. & Bilmes, Linda J. 2008. *The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict*. New York: W.W Norton & Company, Inc.

Sukma, Rizal. 2003. *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni Amerika Serikat dan Implikasi Regional*. Denpasar. CSIS.

Viotti, Paul & Kauppi, Mark. 2007. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity 3rd Edition*. New Jersey: Pearson-Prentice Hall.

Wood, Grame. Maret 2015. "*What ISIS Really Wants*". The Atlantic. Diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/whatisisreallywants/384980/> pada 3 Mei 2018 pukul 2.19 WIB.

Zelin, Aaron Y., 2014. *Mengenal Lebih Jauh Abu Bakr al Baghdadi*. Washigton: BBC Indonesia. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140731_albaghdadi_negara_islam pada 12 Februari 2018 pukul 23.40 WIB